

**ANALISIS PERAN PEGAWAI INSPEKTORAT DALAM
PENINGKATAN PENGAWASAN PEMERINTAH
DAERAH SUMATERA SELATAN 2025**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



oleh :

MUTIARA RAMANDA
NIM. 07011182126035

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEGAWAI INSPEKTORAT DALAM
PENINGKATAN PENGAWASAN PEMERINTAH
DAERAH SUMATERA SELATAN 2025**

SKRIPSI

Oleh:

MUTIARA RAMANDA

NIM.07011182126035

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, September 2025

Pembimbing,

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121000



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS PERAN PEGAWAI INSPEKTORAT DALAM PENINGKATAN
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN 2025

SKRIPSI

Oleh :

MUTIARA RAMANDA

NIM. 07011182126035

Telah dipertahankan di depan penguji

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada Tanggal September 2025

Pembimbing :

1 Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Penguji :

1 Lisa Mandasari, S.IP., M.Si
NIP. 198603272023212029

2 Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si
NIP. 198902222023212044

Mengetahui

Dekan FISIP UNSRI

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik

Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUTIARA RAMANDA

N I M : 07011182126035

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Peran Pegawai Inspektorat Dalam Peningkatan Pengawasan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan 2025** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang di temukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, September 2025



MUTIARA RAMANDA

NIM. 07011182126035

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setelah kesulitan akan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts”

(Winston Churchill)

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.”

“Hidup ini ibarat mengendarai sepeda, untuk menjaga keseimbangan kita harus terus bergerak.

Dalam setiap perjalanan, baik dalam studi maupun kehidupan, berhenti bukanlah pilihan. Meskipun jalan yang ditempuh kadang terjal, dengan keberanian untuk terus melangkah, keseimbangan akan terjaga, tujuan kan tercapai, dan setiap tantangan akan menjadi bagian dari proses pendewasaan diri”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang Tua Penulis, Buya dan Umi
2. Saudara dan Saudari Penulis
3. Sahabat Penulis
4. Universitas Sriwijaya
5. Bangsa Dan Negara

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Peran Pegawai Inspektorat dalam Peningkatan Pengawasan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan 2025". Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan peran pegawai Inspektorat dalam meningkatkan pengawasan, dengan fokus pada aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan pengawasan, dan pengaruh interpersonal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai Inspektorat telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai prosedur, namun masih terdapat kendala. Dari aspek kualitas, audit dilaksanakan cukup baik tetapi ketelitian data masih perlu ditingkatkan. Dari segi kuantitas, program pengawasan tahunan terlaksana, meski pemeriksaan belum merata di semua unit kerja. Pada aspek ketepatan waktu, masih terjadi keterlambatan pemrosesan dokumen. Efektivitas biaya relatif efisien melalui pemanfaatan probity audit digital. Kebutuhan pengawasan dipenuhi melalui pembinaan preventif, sementara pengaruh interpersonal ditunjukkan melalui komunikasi dengan OPD meski masih menghadapi resistensi pada rekomendasi tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pegawai Inspektorat berperan cukup efektif, namun peningkatan ketepatan waktu dan pemerataan pengawasan masih diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Kata Kunci: Inspektorat, Pengawasan, Pemerintah Daerah, Kinerja

Pembimbing



Dr. ANDRIES LIONARDO, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Indralaya, September 2025
Kendari Jurusan ilmu administrasi publik
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas sriwijaya




Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of the Role of Inspectorate Employees in Strengthening Government Oversight in South Sumatra Province 2025". The purpose of this study is to describe the role of Inspectorate employees in enhancing oversight, focusing on six aspects: quality, quantity, timeliness, cost-effectiveness, supervisory needs, and interpersonal influence. The study employed a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings show that Inspectorate employees generally perform their supervisory functions according to procedures, though several challenges remain. In terms of quality, audits are carried out adequately, but data accuracy still needs improvement. In quantity, annual supervision programs are implemented, although monitoring is not evenly distributed across all units. Regarding timeliness, document processing often experiences delays. Costeffectiveness is achieved through the use of digital probity audits. Supervisory needs are addressed through preventive guidance, while interpersonal influence is reflected in effective communication with regional apparatus organizations, despite occasional resistance to recommendations. The study concludes that Inspectorate employees play an effective role in government oversight; however, improvements in timeliness and equitable supervision are still required to achieve accountable and integrity-based governance.

Keywords: Inspectorate, Oversight, Local Government, Performance

Pembimbing



Dr. ANDRIES LIONARDO, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Indralaya, September 2025

Ketua jurusan ilmu administrasi publik
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Atas nikmat yang begitu luar biasa. Kesehatan, ilmu pengetahuan, kasih sayang, dan anugerah cinta yang telah ia berikan. Berkat karunia dan kemudahan dari-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Peran Pegawai Inspektorat Dalam Peningkatan Pengawasan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan 2025” dengan tepat waktu. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah SAW. Perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini bukanlah hal yang mudah dan tidak terlepas dari lika-liku, namun berkat dukungan dan doa dari orang-orang hebat dan terkasih yang selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan, sehingga penulis dapat melalui setiap prosesnya. Dengan penuh syukur, penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT, Terima Kasih sudah menguatkan hamba disaat hamba ingin menyerah, Terima kasih sudah menjawab doa-doa dan memberikan petunjuk serta kemudahan disetiap langkah, dan proses yang hamba lewati.
2. Rasulullah SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi setiap umat.
3. Penulisan Skripsi ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua, H. Mat Uju dan Megawati S.Ag Terima Kasih banyak telah menjadi penguat dan alasan penulis untuk terus maju Terima kasih banyak telah mendukung setiap keputusan yang penulis ambil. Terima kasih telah menjadi contoh yang baik dalam kehidupan penulis, terima kasih untuk setiap doa yang Buya dan Umi berikan, Terima kasih kesabaran dan kasih sayang yang telah Buya dan Umi berikan, terima kasih atas semua pengorbanannya.
4. Terima Kasih juga untuk saudara/i penulis Muammar Khadafi, Muslim Sultan Ansyori, Mawaddah Hasanah yang telah banyak memberikan motivasi, semangat dan kasih sayang kepada penulis sampai saat ini sehingga bisa sampai dititik ini.
5. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

6. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

7. Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.

8. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan meluangkan waktunya untuk penulis. Penulis ucapkan terima kasih banyak untuk segala kemudahan dan dukungan yang sudah diberikan. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan serta kemudahan baik duniawi dan ahirah termasuk dalam proses Pendidikan selanjutnya.

9. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis dari awal masuk perkuliahan hingga penulis menyelesaikan pendidikan.

10. Bapak dan ibu dosen jurusan ilmu administrasi publik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat selama penulis menempuh pendidikan. 12. Staf dan Admin jurusan administrasi publik terutama mba Ita Permata Sari yang telah banyak membantu setiap proses penulis dan pemberkasan selama penulis menempuh pendidikan.

11. Teman seperjuangan Rozy, Naswa, Luluk, Haiekal Rama Permana Putra, Lena, Ferdinan, Iksan, Dioba, Siti Munawaroh dan seluruh rekan di organisasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya, serta meluangkan waktu dan membantu penulis selama menyelesaikan proses perkuliahan sampai skripsi.

12. khusus Rozy pratama orang yang selalu mendorong, membantu dan memberikan banyak ruang bertumbuh dan berkembang yang insyaallah akan berguna di kemudian hari.

13. Terima kasih almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya dalam semua cerita, ilmu, relasi dan kenangan yang telah banyak penulis lewati dari pertama lulus SNMPTN sampai akhir penulisan tugas akhir skripsi ini, terima kasih atas semua keluh dan kesah yang sudah pernah hadir didiri penulis selama berdiri di atas tanah Universitas Sriwijaya.

14. Terakhir untuk segala rasa kecewa, Bahagia, senang dan sedih serta seluruh jenis rasa dalam perasaan yang disalurkan oleh siapapun itu dalam proses pembelajaran di Universitas Sriwijaya, Trimakasih telah menjadi sumber energi baru dan terbarukan bagi penulis di setiap masa yang dilewati. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya sederhana penuh perjuangan ini dapat memberi manfaat bagi banyak orang.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.2 Pengertian Pengawasan Pemerintah Daerah	8
2.3 Peran dan Fungsi Pegawai Inspektorat	9
2.4 Kinerja	13
2.5 Pengelolaan Data-Data kinerja Instansi	20
2.6 Model-model Teori	20
2.7 Penelitian Terdahulu	53
2.8 Kerangka Berfikir	57
BAB III.....	59
METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Jenis Penelitian	59
3.2 Lokasi Penelitian	59
3.3 Definisi Konsep.....	59
3.4 Fokus Penelitian	60
3.5 Jenis dan Sumber Data	62
3.6 Informan Penelitian.....	62
3.7 Teknik Pengumpulan Data	63
3.8 Teknik Analisi Data.....	65

BAB IV	68
PEMBAHASAN	68
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	68
4.2 Informan Penelitian.....	71
4.3 Hasil Penelitian	72
4.3.1Kualitas	72
4.3.2 Kuantitas	76
4.3.3 Ketepatan waktu	83
4.3.4 Efektivitas biaya	89
4.3.5 Kebutuhkan pengawasan	94
4.3.6 Pengaruh interpersonal.....	99
4.4 Hasil Pembahasan	105
4.4.1Kualitas	105
4.4.2 Kuantitas	107
4.4.3 Ketepatan waktu.....	111
4.4.4 Efektivitas biaya	114
4.4.5 Membutuhkan pengawasan.....	116
4.3.6 Pengaruh interpersonal	121
BAB V.....	153
PENUTUP	153
5.1 Kesimpulan	153
5.2 Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156

DAFTAR TABEL

Tabel1. 1Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	53
Tabel 3. 1Fokus Penelitian berdasarkan dengan teori Bernardin & Russell (2013)...	60
Tabel 3. 2Informan Penelitian	63
Tabel 4. 1Informan Penelitian	71
Tabel 4. 2Matriks Hasil Penelitian	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1Kerangka Berfikir	57
Gambar 3. 1komponen analisis data model interaktif	66
gambar 4. 1Lokasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	69
gambar 4. 2Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	69
gambar 4. 3wawancara dengan Kepala Inspektur Pembantu III	72
gambar 4. 4rapat internal.....	75
gambar 4. 5Dokumen Probity Audit 2023	78
gambar 4. 6Dokumen Probity Audit 2023	81
gambar 4. 7Dokumen Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas	85
gambar 4. 8Dokumen Nota Dinas	88
gambar 4. 9rapat internal tim pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	91
gambar 4. 10Dokumen forum kerja sama	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (good governance and clean government), diperlukan adanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dalam menjalankan tugastugas pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, yang terdiri atas:

1. Assurance Activities
2. Early Warning System
3. Consulting Activities

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah meliputi: Pengawasan kebijakan, Pengawasan anggaran, Pengawasan kinerja, Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah mengedepankan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah sejak tahap perencanaan. Selain Inspektorat Daerah, ada juga lembaga lain yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), GWPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPK-RI.

Terdapat hubungan yang menguntungkan antara kinerja suatu organisasi dan kinerja pegawai. Terdapat korelasi langsung antara kinerja seorang pegawai dengan kinerja organisasi tempat bekerja. Ketika kinerja pegawai buruk maka kinerja organisasi juga rendah, setiap organisasi mengandalkan sumber daya manusianya untuk menjalankan misinya. Istilah “ sumber daya manusia “ menggambarkan aset yang membantu mengatur aset lain dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Aset organisasi yang paling berharga adalah tenaga kerjanya, yang termasuk dalam istilah sumber daya manusia. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan dengan efektif dan efisien, oleh karena itu ketika mengevaluasi kinerja suatu organisasi, kinerja organisasi harus dinilai berdasarkan kinerja pegawai.

Pencapaian dalam kinerja atau pekerjaan mengacu pada hasil terukur yang dicapai oleh individu atau organisasi saat menjalankan aktivitas dan tanggung jawab utama mereka. Pengukuran kinerja merupakan upaya yang penting karena berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Kinerja seorang individu ditentukan oleh sintesis dari kemampuan, usaha dan peluangnya, serta dapat di evaluasi berdasarkan hasil tugasnya (Rosidah dan Ambar Tegus Sulistiyani, 2003). Kinerja seorang pegawai merupakan hasil akhir dari

usahanya dalam memenuhi tanggung jawab yang diberikan, diukur dari kualitas dan kuantitas pekerjaannya. (Mangkunegara, 2004). Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

1. Menyusun kegiatan rencana dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektorat Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah Dinas
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
6. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan mengendalikan dan fasilitasi serta merumuskan kebijakan teknis terkait dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa.
7. Mengoordinasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan pengawasan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada aparat tentang program pembinaan dan pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah kepada perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dilakukan sebuah tim yang disebut Tim Penilai Kinerja yang dibentuk oleh pejabat berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan, Upaya pemerintah guna meningkatkan kinerja Pegawai agar

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 adalah dengan menggelar sosialisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggulan, serta penilaian 360 derajat menjadi tonggak penting demi tercapainya visi Indonesia Maju.

Pengawasan mempunyai peran penting dalam suatu organisasi Pemerintah pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya. Dalam ilmu manajemen pengawasan ditempatkan sebagai tahapan akhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui untuk kemudia dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan harus sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab dari ketidakcocokan yang nyncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan yang bercirikan Good Governance (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik), pengawasan merupakan aspek penting utnuk menjaga fungsi Pemerintahan dapat berjalan sebagai mana mestinya. Dalam konteks ini pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan Good Governance itu sendiri.

Sehubungan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan extern (External Control). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (Social Control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP) bahwa kinerja pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan dengan efektif. Ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan tugas tentunya mempengaruhi kinerja dari pegawai, ada kendala dalam kesalahan data dalam proses pemeriksaan karena pegawai yang bertugas dalam mengurus data-data di subbagian Irban tiga Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Salah satu indikatornya adalah tingginya tingkat pergantian diantara mereka yang bertugas memproses data yang masuk dan keluar sesuai dengan persyaratan tenggat waktu Organisasi.

Berdasarkan data petugas agenda pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan data instansi yang hendak diproses terhambat pada staf irban 3 yang mengola data, seharusnya data yang diproses selesai dalam tiga hari, namun karena keterlambatan tersebut menjadi empat hari pengerjaan.

Hingga November 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki total pekerja yang sedang bekerja sebanyak 116 orang. Ketenagakerjaan dipartisi menjadi beberapa divisi dalam inspektorat. Adapun jumlah personel di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel1. 1Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025

No	Bagian Dan Sub Bagian Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025	Pegawai Inspektorat		Jumlah
		PNS	Honorar	
1.	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	40	3	43
2.	Sub Bagian Keuangan	15	2	17
3.	Sub Bagian Perencanaa Evaluasi Dan Laporan	12	0	12
4.	Inspektur Pembantu I	13	1	14
5.	Inspektur Pembantu II	13	0	13
6.	Inspektur Pembantu III	13	0	13
7.	Inspektur Pembantu Iv	13	0	13
8.	Inspektur Pembantu Khusus	12	1	13
Jumlah		131	7	138

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dari Table diatas sebanyak 95% PNS dan 5% Honorar. Yang terdiri dari 93% PNS dan 7% Honorar disub bagian umum dan kepegawaian, 88% PNS dan 12% Honorar disub bagian keuangan, 100% PNS disub bagian perencanaan evaluasi dan

pelaporan, 93% PNS dan 7% Honorer disub bagian Inspektur Pembantu I, 100% PNS disub bagian Inspektur Pembantu II, 100% PNS disub bagian Inspektur Pembantu III, 100% PNS disub bagian Inspektur Pembantu IV, 92% PNS dan 8% Honorer disub bagian Inspektur Pembantu Khusus.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran anggota pegawai inspektorat dalam meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Selatan 2025 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diketahui yang menjadi tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mendeskripsikan peran pegawai Inspektorat dalam meningkatkan pengawasan terhadap peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Selatan 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini untuk memberikan konstribusi tentang peningkatan pengawasan Pemerintah Daerah Sumatra Selatan yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatra Selatan, yaitu pada umumnya Ilmu Administrasi Publik dan peran pegawai Inspektorat daerah Prov.Sumatra Selatan dalam Formulasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan tentang peran pegawai Inspektorat dalam meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah Daerah Prov.Sumatra Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2017). Fungsi pengawasan kinerja pegawai. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak, Gema Kampus*.
- Amiruddin. (2016). FUNGSI PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KANTOR DISTRIK NUMFOR TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 11(2), 10-17.
- Andi Nimah Sulfiani, Rizka Firdaus. Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek Illegal Logging Di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. *Administrasi Publik* 18 (2).2022
- Bernhard Tewal. Lucky OH Dotulong. Pengaruh gaya kepemimpinan pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Goverd Adler Clinton Rompas. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi. Manajemen. Bisnis Dan Akuntansi* 6 (4). (2018)
- Didi Djadjuli. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4 (4). 565-573. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai
- Doni Marlius. Wetri Yulita. *Ensiklopedia of Journal* 6 (3). (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan. Pengawasan. Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Bupati Solok Selatan
- Dwiki Ramdani. Darmawaty Abd Razak. Sandi Prahara Hulondalo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 1.619591. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Aviation Security Di Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo. (2022)
- Elmi Najriyana. (2021). Pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai Cv Options House. *sekolah tinggi ilmu administrasi tabalong* 71571.
- Fadli Sandewa. (2017) pengawasan kinerja pegawai dikantor kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. *Program Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako*

- Hasan, I. A. (2017). Strategi peningkatan kinerja pegawai: Studi kasus di Kantor Radio Republik Indonesia Cabang Biak Numfor. *Jurnal Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*.
- Hidayati, S. N., & Ermiyanto, A. (2017). Analisis faktor motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai mediasi. *Jurnal Maksipreneur*.
- Inspektorat Kabupaten Mojokerto. (2023). *Buku profil Inspektorat*. https://inspektorat.mojokertokab.go.id/download/view/buku-profil-inspektorat-20230919_133438.pdf
- Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. Universitas Brawijaya Press, 2001. Dekonstruksi hukum pengawasan pemerintahan daerah: the turning point of local autonomy
- Johnson, J. C. (2001). *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marisca Evalina Gondokesumo, Nabbilah Amir. Perspektif Hukum, 274-290, 2021 Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
- Manullang, M. (2001). *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Manullang, M., & Manullang, M. (2000). *Manajemen personalia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Murni, A. F. N. (2024). *Peningkatan kinerja pegawai melalui pengawasan dan lingkungan kerja dimediasi oleh motivasi dan disiplin kerja* [Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandira]. Kupang.
- Newman. (2001). *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nur Afni syahputri. Pengawasan pelaksanaan tugas pegawai oleh pimpinan di kantor. Universitas negeri padang (2020)
- Sari, N., Lie, D., efendi, E., & Inrawan, A. (2018). PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR. *Maker: Jurnal Manajemen*, 1(1), 49–56.

- Suhariyanto. Askriyandoko Putro. (2018) Analisis pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja kariyawan Cv tiga putra.stie kusuma negara.jl mastrip(59).Jawa Timur.
- Nuryani, & Hidayat, W. (2022). Evaluasi kinerja pegawai rekam medis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Medika Stania. *STISIPOL Pahlawan 12*.
- Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). Kinerja pengawasan pelayanan publik dalam prioritas nasional. *Bappenas Working Papers*.